

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau, dengan populasi hampir 270.054.853 jiwa pada tahun 2018. Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 230 juta jiwa.¹

Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan bentuk kesatuan Negara Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. Adapun potensi konflik di Indonesia yang harus benar-benar kita waspadai, mengantisipasi dan mengelola dengan cermat, yaitu;

Pertama, konflik agraria yang terkait dengan perkebunan dan pertambangan, *Kedua*, konflik perburuhan dengan contoh kasus di Bekasi yang untungnya solusi dan kesepakatan dengan para pengusaha bisa ditemukan, *Ketiga*, konflik yang bertendensi suku, agama, rasa, dan antargolongan (SARA) sebagai konsekuensi sebagai bangsa yang majemuk.

¹Indonesia, Pengertian Indonesia secara umum <https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan>, Diakses pada tanggal 12 Juli 2019.

Contohnya adalah kasus Ahmadiyah dan GKI Yasmin, *Keempat*, konflik yang muncul akibat kemiskinan dan pengangguran, *Kelima*, konflik politik yang muncul sebagai residu dari kompetisi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal.²

Ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta, keberagaman Indonesia, Selain didasari oleh latar belakang sosial budaya, geografi dan sejarah yang sama, kesatuan bangsa Indonesia juga didasari oleh kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup dalam berbangsa dan bernegara. Pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara holistik tercermin dalam sila-sila Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sedangkan kesatuan pandangan, ideologi dan falsafah hidup bangsa Indonesia secara eksplisit tercantum dalam lambang negara yang bertuliskan "*Bhinneka Tunggal Ika*", yang mengandung makna "*beraneka ragam* (suku bangsa, agama, bahasa) *namun tetap satu* (Indonesia).

Berkaitan dengan tujuan inilah sangat penting di pupuk rasa persatuan dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia untuk memahaminya lewat pendekatan kebudayaan se-Indonesia. Berbagai kegiatan sosial budaya berciri gotong royong memperlihatkan karakter masyarakat Indonesia yang saling menghormati antara berbagai perbedaan golongan, suku bangsa, hingga agama.

²Bentuk Negara Indonesia <https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>, diakses pada tanggal 12 Juli 2019

Indonesia memiliki keberagaman suku yang berbeda 1.340 suku bangsa, 300 kelompok etnik.³

Bagi sebuah Negara modern bukan hanya berwujud sebuah unit Geopolitik semata, namun dalam kenyataannya senantiasa mengandung keragaman Bahasa Daerah dan keberagaman agama yang saling mengedepankan sikap saling bertoleransi agama di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Kong Hu Cu, dan agama lainnya.⁴ Adapun identitas seseorang di tentukan oleh keanggotaanya di dalam berbagai kesatuan sosial. Seseorang adalah berasal dari suku Bugis dengan kebudayaan Bugisnya, sehingga dapat di katakan ia mempunyai identitas Bugis, dan demikian seterusnya terhadap suku Dani, Amuke, Tugutil, Jawa, Bali, Manggarai dan lain-lain.⁵

Sumatera Selatan juga salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki banyak keragaman. Sumatera Selatan mempunyai 17 Kabupaten Kota dengan beragam Suku, Ras, Agama, dan antar golongan, warga Sumatera Selatan sangat mengedepankan sifat saling bertoleransi dan saling menghargai satu sama lain.

Adapun Agama yang ada di Sumatera Selatan dengan presentase Islam 94.30% Kristen Protestan 1.96% Buddha 1.76% Katolik 1.11% Hindu 0.87%, Suku Komeriing, Suku Gumai, Suku Palembang, Suku Lintang, Suku Lematang, Suku Semendo, Suku Kayu Agung, Suku Pasemah, Suku Sekayu, Suku Banyuasin, Suku Rawas, Suku Ogan, dan mempunyai beragam Bahasa antara lain

³Ida Bagus Brata (2016) "*Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*". Vol. 05 No. 01. Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal 10

⁴Akhsan Na'im (2011), Hendry Syaputra, Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari-hari Penduduk Indonesia, Jakarta:Indonesia, 2011, hal 10

⁵Ida Bagus Brata (2016) "*Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa*". Vol. 05 No. 01. Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal 10

Indonesia (bahasa resmi) Melayu, Penesak, Musi, Palembang, Komerling, Bahasa Lintang, Pasemah, Ogan.

Hubungan sosial terutama di dasarkan kepada semangat kebangsaan, walaupun dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi oleh adat istiadat, seperti dalam bercakap-cakap atau cara bicara yang sopan. Pada umumnya penduduk Sumatera Selatan sangat hormat kepada para tamu dan pengunjung yang berasal dari daerah lain. Gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh era modernisasi. Sebagian besar penduduk sangat terbuka dalam perilaku mereka terutama dengan aspek positif serta menyambut baik reformasi dan inovasi terutama yang berkaitan dengan konsep pembangunan.

Ogan Komerling Ulu Timur terbentuk sebagai pemekaran Kabupaten Ogan Komerling Ulu. Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu daerah yang maju dan terdepan di Provinsi Sumatra Selatan. Yang didiami penduduk dengan beragam multi etnis suku dengan penduduk asli suku komering, kemudian ada suku Jawa, Ogan, Bali dan sejumlah suku lainnya yang ada di Nusantara meskipun demikian kehidupan rukun penuh kekerabatan yang sangat kental. Suku Komerling yang hampir 80 persen menempati wilayah ini seperti di daerah Gunung Jati, Campang Tiga, Semendawai, Kangkung, Betung, Martapura, Gunung Batu, Muncak Kabau, Belintang, Buay Madang, Minanga, Belintang (sebagian), dan Madang Suku.

Menurut Perda No 18 tahun 2011 tentang pelestarian dan pengembangan bahasa daerah di sektor formal dan non formal di Ogan Komerling Ulu Timur terdapat tiga bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, Komerling, Jawa. Adapun agama yang di anut di Ogan Komerling Ulu Timur ini yaitu Islam, Kristen,

Protestan, Buddha, Katholik, Hindu. Pergaulan hidup antar umat beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur secara umum, berlangsung damai dan saling menghargai, sehingga kondisi aman dan terpeliharanya kerukunan dapat terjaga.

Istilah desa sering kali identik dengan masyarakat yang miskin, tradisional, dan kolot (Misbahul Anwar 2012). Namun, sebenarnya desa mempunyai keluhuran dan kearifan lokal yang luar biasa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶

Desa Nusa jaya terletak di Kecamatan Belitang 3 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Desa Nusa Jaya di dirikan pada tahun 1961 pada masa kepemimpinan Soeharto di zaman orde baru, Desa ini sangat terkenal dengan keberagaman budayanya yang sangat menonjol. Secara administratif letak geografis Desa Nusa Jaya, dengan jumlah penduduk sebanyak 1670 jiwa dan 496 Kartu Keluarga. Wilayah Desa Nusa Jaya berbatasan sebelah utara Desa Nusa Agung Belitang 3, sebelah Selatan Desa Nusa Bakti Belitang 3, sebelah Timur Desa Nusa Tenggara Belitang 3 dan sebelah Barat Desa Sinu Marga Belitang 3. Adapun luas wilayah menurut penggunaan yaitu luas pemukiman 15 ha/m²

⁶Tim Visi Yustisia,'Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Desa'.(Jakarta:Visimedia, 2016). Hlm 15

dengan luas perkebunan 65 ha/m² luas kuburan 1,5 ha/m² dan luas perkantoran 0,25 ha/m².

Bekaitan dengan potensi konflik di Desa Nusa Jaya, hal yang paling kontras adalah beragamnya identitas masyarakat yang berasal dari berbagai etnis dan agama, berdasarkan etnisitas tersebut, Desa ini didominasi oleh etnis Komerling, Batak, Jawa, Sunda dan Melayu. Sebagian besar dari mereka berperan sebagai Pedagang, Pegawai Negeri, Guru, maupun buruh perusahaan. Adapun penduduk asli lebih banyak bermata pencaharian di bidang pertanian dengan pola perladangan (gilir balik) yang menjadi warisan turun temurun keluarga mereka. Tidak heran presentase keluarga pertanian menyentuh angka 90% di mayoritas desa di Desa ini.

Yang dimana di Desa ini mempunyai hal menarik yang tidak dimiliki Desa lainnya salah satunya yaitu setiap malam 17 Agustus mereka selalu di kumpulkan menjadi satu di balaidesa dan di kelompokkan menjadi 4 kelompok yang sesuai dengan keyakinan masing-masing guna untuk melakukan doa bersama dan sebelum melakukan doa mereka terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang bertujuan apapun agama dan keyakinan

Desa ini memiliki penduduk dengan keberagaman agama dan kepercayaan, namun memiliki sikap toleransi dan kerukunan tinggi. Adapun agama yang dianut di Desa Nusa Jaya ini yaitu agama Islam, Kristen, Katholik dan Budha.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan penjelasan diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan sebagai langkah memfokuskan penelitian ini. Rumusan masalah tersebut yaitu:

1. Bagaimanakah Kehidupan Umat Beragama dan Etnis di Desa Nusa Jaya Kecamatan Belitang 3 Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan?
2. Bagaimanakah Tinjauan Politik Identitas di Desa Nusa Jaya Kecamatan Belitang 3 Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kehidupan Umat Beragama dan Etnis di Desa Nusa Jaya Kecamatan Belitang 3 Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Politik Identitas di Desa Nusa Jaya Kecamatan Belitang 3 Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kajian Ilmu Politik terutama pada kehidupan umat beragama dan etnis. Diharapkan mampu menjadi acuan dalam penelitian dimasa depan terkait bagaimana kehidupan umat beragama sebuah Desa yang masyarakatnya Multi Identitas dan kerukunannya tetap terjaga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi masyarakat, terutama dalam tinjauan politik identitas yang di lakukan oleh pemerintah Desa setempat terutama bagi tokoh-tokoh yang berperan di dalam masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Sebagai suatu konsep yang mendasar apa yang di namakan identitas, tentunya menjadi sesuatu yang sangat sering kita dengar. Terlebih lagi, ini merupakan konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Sebagaimana yang telah di kemukakan di atas maka peneliti juga menggali informasi dari buku-buku maupun skripsi dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

Pertama, Penelitian Muhtar Habbodin (2012) "*Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*". Dalam hasil penelitian ini memaparkan bagaimana proses menguatnya Politik Identitas di ranah lokal khususnya di Provinsi Riau -

Kalimantan Tengah-Kalimantan Barat dan Irian Jaya berlangsung. Penguatan politik etnisitas merupakan potret diri dari pergulatan politik lokal. Sebuah potret yang berwajah ganda. Wajah pertamanya berwujud dengan putra daerah sebagaimana terjadi di Kalimantan Barat, Riau, Papua dan Kalimantan Tengah, tetapi wajah lainnya dari politik identitas bisa berwujud pada perjuangan untuk mendapatkan alokasi dana dari pemerintah pusat. Dimana proses desentralisasi politik ternyata diiringi dengan isu putra daerah. Sebuah isu yang sarat makna dan sangat mengkhawatirkan bukan hanya proses demokrasi lokal akan terancam, tetapi juga menjadi petunjuk memudarnya semangat nasionalisme.⁷

Kedua, Dedy Syahputra (2017) "Politik Identitas Etnik Jawa Di Sumatera Utara "Studi Sejarah, Pemikiran dan Kekuatan Politik". Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, dari hasil penelitian serta kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan serta jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik pada Skripsi ini, antara lain: 1. Politik Identitas etnik Jawa di Sumatera Utara muncul tidak terlepas dari filosofi-flisofi orang Jawa alon-alon waton kelakon (perlahan-lahan tapi pasti), Hamangku sebagai sikap dan pandangan yang harus berani bertanggung jawab terhadap kewajibannya, hamengku sebagai sikap dan pandangan yang harus berani ngrengkuh (mengaku sebagai kewajibannya dan hamengkoni dalam arti selalu bersikap berani melindungi dalam segala situasi.

⁷ Muhtar Habbodin (2012) "*Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal*". Vol 3 No. 1, Jurnal Universitas Brawijaya Malang, hal 134

Politik identitas etnik Jawa di Sumatera Utara muncul dari keterwakilan tokoh-tokoh Jawa terjun ke dalam politik antara lain: Gatot Pujo Nugroho (Mantan Gubernur Sumatera Utara), Soekirman (Bupati Serdang Bedagai), Kasim Siyo (Mantan Komisaris Bank Pembangunan daerah (BPD) Sumatera Utara), Sudarwanto (Mantan Wakil Bupati Labuhan Batu), Wagirin Arman (Ketua DPRD Sumatera Utara), Budiono (Mantan Wakil Bupati Langkat), Sulistianto (Wakil Bupati Langkat). Jumlah yang dominan orang Jawa di Sumatera Utara sebagai kekuatan untuk menduduki kekuasaan dan diperhitungkan oleh calon-calon kepala daerah. Keberadaan paguyuban berjumlah 38 menciptakan jaringan etnik Jawa dari pusat hingga ranting bahkan partai politik untuk menciptakan identitas dari etnik Jawa. Pola kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban melalui acara suroan, syukuran, punggahan, koperasi, bakti sosial dan arisan untuk mengefektifkan orang Jawa.⁸

Ketiga, Saradi Wantona, Rilus A. Kinseng, dan Sofyan Sjaf (2018). "*Praktik Politik Identitas Dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo*". Dalam jurnal ini menjelaskan bahwasannya Praktik politik identitas yang terjadi dalam masyarakat Gayo Lut ditandai dua hal. Pertama, setiap aktor yang bertarung dalam mengikuti pemilihan kepala daerah dominan memainkan modal mereka dari modal politik, modal sosial, dan modal ekonomi. Kemudian peranan masing-masing habitus aktor dipengaruhi oleh sejarah, budaya dan agama yang terbentuk melalui proses interaksi terutama dengan hadirnya identitas Uken dan

⁸Dedy Syahputra (2017) "*Politik Identitas Etnik Jawa Di Sumatera Utara*" "Studi Sejarah, Pemikiran dan Kekuatan Politik". Jurnal Universitas Sumatera Utara, hal 97

Toa dalam masyarakat Gayo. Selain itu, habitus aktor cenderung berafiliasi dengan hasrat berkuasa dan mempropagandakan urang-urang (orang) baik Uken dan Toa untuk mencapai tujuan aktor.

Hasil penelitian ini menyarankan bahwa, propaganda mengenai Uken dan Toa sepatutnya dihilangkan. Tujuannya adalah untuk melahirkan pemimpin politik yang yang menceminkan representasi identitas dan mampu membangun Gayo secara komprehensif di semua sektor, bukan pemimpin yang diwarnai oleh kepentingan kelompok tertentu. Politik yang tidak mengedepankan kelompok atau identitas tertentu akan membawa dampak pada kemajuan wilayah yang lebih baik.⁹

Keempat, Abdul Syukur (2011) " Islam, Etnisistas, dan Politik Identitas kasus Sunda". Dari jurnal ini menyimpulkan bahwa Menjaga dan mempertahankan kebudayaan dan keragaman dalam suatu masyarakat tidak lepas dari peranan para elit masyarakat yang bersangkutan. Ditangan para elit inilah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan anggota masyarakat mengalami perkembangan. Kontak antara budaya, yang terjadi lewat individu maupun kelompok sosial, memungkinkan terjadinya perubahan kebudayaan suatu masyarakat. Tetapi tetap saja ditangan para elit inilah unsur-unsur budaya yang masuk disaring, diolah, ditolak atau ditetapkan untuk menjadi bagian dari kebudayaannya. Dengan kata lain, perubahan diterima selagi tidak membuat struktur sosial yang lebih besar mengalami perubahan radikal. Itulah sebabnya

⁹Saradi Wantona, Rilus A. Kinseng, dan Sofyan Sjaf (2018). "*Praktik Politik Identitas Dalam Dinamika Politik Lokal Masyarakat Gayo*". Vol 6 No.1. Jurnal Institut Pertanian Bogor, hal 86

pendekatan Struktural Fungsional kerap dianggap sebagai pendekatan yang mendukung status *quo*.

Dalam konteks hubungan antara Islam dan Sunda, pernyataan “Sunda adalah Islam” dapat dikatakan sebagai upaya dari sekelompok elit orang Sunda dalam mengkonstruksi identitas etnik Sunda, yaitu dengan membedakannya dari budaya etnik Jawa, disatu pihak dan mengidentikkan Sunda dengan Islam, di pihak lain. Sejarah kekalahan etnik Sunda yang terus menerus oleh kekuatan etnik Jawa memberikan pelajaran kepada elit-elit Sunda untuk menarik batas yang tegas dengan mengidentikkan Sunda dengan Islam.¹⁰

Kelima, Abdul Kholiq (2013) “Islam Kalang: Politik Identitas Sub Etnis Jawa”. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa dari keseluruhan pembahasan di atas dapat disimpulkan,

pertama: Orang Kalang Sendangdawuhan umumnya mengidentifikasi diri sebagai entitas Kalangan secara formal menganut agama resmi Islam. Keislaman orang Kalang tergolong unik, karena mereka masih mempercayai sistem kepercayaan dan konsep budaya Kalang dalam keislamannya. Ke-kalangan seseorang tampak pada kesetiiaannya dalam melaksanakan ritus daur hidup, serta sejumlah konsepsi tentang pranata kehidupan yang diajarkan nenek moyang, seperti sayud (ewuhan), upacara Obong ataupun galungan.

Kedua: faktor yang mempengaruhi identitas Kalang, antara lain 1) faktor keturunan. Ke-Kalang-an orang-orang Sendangdawuhan bisa dipilah dalam

¹⁰Abdul Syukur (2011) " Islam, Etnisistas, dan Politik Identitas kasus Sunda". Vol. XXXV No.2. Jurnal Universitas Islam Negeri Gunung Djati, hal 424

Kalang “dalam” atau “asli” atau juga disebut otentik dengan Kalang “luar” atau “campuran”. Disebut Kalang asli, jika seseorang dilahirkan dari ayah dan ibunya Kalang; sedangkan Kalang luar adalah mereka yang dilahirkan dari ayah atau ibu campuran antara Kalang dan non-Kalang. 2) faktor keberagamaan.

Keislaman orang-orang kalang Sendangdawuhan dapat dikategorikan dalam tiga kelompok; yakni a) Kelompok revivalis. Identitas ke-Kalang-annya “dominan” baik dalam perspektif personal maupun sosial. Posisi mereka sebagai “abangan ekstrem” adalah bukti bagaimana mereka tidak sepenuhnya menerima Islam sebagai identitas barunya. b) kelompok kompromis, yakni mereka menerima Islam sebagai identitas barunya hanya tidak menggantikan identitas Kalangnya. Mereka melaksanakan kegiatan keagamaan seperti umumnya santri, hanya mereka juga masih meyakini sistem kepercayaan dan melaksanakan konsep budaya Kalang. c)

kelompok santri (identitas baru), adalah mereka mengkonversikan diri dalam identitas barunya “santri” dengan menanggalkan keseluruhan sistem kepercayaan dan konsepsi tradisi Kalang.

Ketiga: Terjadinya islamisasi (kolonialisasi) islam pada masyarakat Kalang Sendangdawuhan menyebabkan terjadinya proses penaklukan kebudayaan (Islam) atas kebudayaan Kalang. Politik identitas menemukan bentuknya ketika fakta-fakta hegemoni Jawa (Islam) yang menyebabkan sense of belonging orang Kalang mulai memudar tanpa terasa.

Diantara resistensi budaya Kalang atas kolonialisasi budaya Islam tampak pada 1) Adanya sistem kepercayaan kuwalat bagi anak keturunan Kalang yang

tidak lagi kekeh memberikan penghormatan “chaos dedaaran” dengan memberikan sesaji bagi roh-roh leluhur baik dalam ritual sayud ataupun obong, seperti sakit, tidak bahagia, miskin dan sebagainya. 2) Cara-cara yang dilakukan kaum kompromis untuk berdamai dan beradaptasi, dengan menerima sistem kepercayaan dan budaya dominan, namun tetap bisa mempertahankan sistem budaya Kalang. 3) Munculnya folklore bahwa “nilai melaksanakan upacara obong sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji.” Menyamakan Obong dengan ibadah haji adalah bentuk dari politik orang-orang Kalang untuk meletakkan tradisi obong sederajat dengan salah satu kewajiban dalam ajaran Islam.¹¹

F. Kerangka Teori

Politik identitas adalah bagaimana identitas yang berbeda di lihat dalam konteks politik. Pelabelan politik identitas pada dasarnya merujuk kepada kolektif bukan sekedar individu, dan publik bukan sekedar privasi, sebuah perjuangan bukan sekedar pengelompokan, yang berkembang untuk pencarian pengakuan (*recognition*) dan legitimasi, bukan hanya sekedar ekspresi atau otonomi.¹² Karena identitas dapat di bentuk di seputar banyak prinsip yang secara umum di golongankan dalam 4 hal yaitu ras etnisitas, gender, agama dan kebudayaan, yang membuat seseorang atau sekelompok orang di bedakan.

Dalgliesh mendefinisikan bahwa politik identitas adalah upaya untuk mengatasi kekosongan representasi politik, atau dalam hal ini bentuk politik yang berupaya untuk mentransformasikan berbagai preferensi beragam dalam

¹¹ Abdul Kholiq (2013) “Islam Kalang: Politik Identitas Sub Etnis Jawa” Vol. 12 No. 1. Jurnal IAIN Walisongo Semarang, Hal 127

¹² Laode Machdani Afala, ‘Politik Identitas di Indonesia’ (Malang:Indonesia, 2018). Hal 13

kebijakan-kebijakan dengan mengkoneksikan mereka ke dalam institusi-institusi representatif tanpa menggunakan kekerasan langsung. Dalam sketsa beragam definisi tersebut, Castell dan Miller, Pfaff, dan Kymlicka, menjelaskan bahwa politik identitas atau politik pengakuan sedikitnya dipicu oleh menyruaknya kesadaran atas diri individu-individu modern untuk secara terus-menerus mengelaborasi identitas partikular, baik dalam relasi seksual, maupun identitas-identitas primordial seperti bangsa, etnis, dan bahkan agama.¹³

Dalam tulisan Stanley Aronowitz tentang “ *The politics of identity: Class, Culture and Social Movements*” secara implisit kita bisa membagi kemunculan politik identitas dalam dua kategori, yaitu; *pertama*, politik identitas lama (*old politics of identity*) yang isu-isunya fokus pada nilai lama modernitas-industrialisme dalam sistem kapitalis pasar dengan sebuah negara liberal yang menggaransikan demokrasi parlementariat dan hak-hak individu dimana identitas diarahkan untuk tujuan politis melalui kepentingan dan posisi ekonomi. *Kedua*, politik identitas baru (*new politics of identity*), yang fokusnya pada politik baru yang terkait dengan identitas-identitas ras, gender, maupun agama. Pada dasarnya, perbedaan tersebut tampak pada isu-isu yang menggerakkan gerakan sosial politik dalam perkembangan sejarah.¹⁴

Di dalam politik identitas pasti mempunyai potensi konflik baik itu merugikan atau menguntungkan bagi masing-masing kelompok. Karena konflik adalah sesuatu yang sukar bahkan tidak bisa dihindari dalam interaksi manusia

¹³ Ibid, hal 16

¹⁴ Ibid, hal 16

dengan manusia lainnya dan pada dasarnya, konflik adalah sesuatu yang inheren dalam diri manusia.

Adapun menurut Gerry Van Klinken berpedapat bahwasannya konflik kekerasan ada lima; *pertama*, kekerasan pemisahan diri, yang berupa ledakan- ledakan kekerasan yang di sponsori oleh militer di Timor Timur, Aceh dan Papua; *kedua*, kekerasan komunal skala besar baik antar agama dan antar-etnis; *ketiga*, huru hara komunal lokal yang banyak terjadi di beberapa kota besar di Indonesia; *keempat*, kekerasan sosial seperti ,vigilantisme dan perselisihan antar desa, dan *kelima*, kekerasan teroris, yang dipelopori oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai pembela agama. Kekerasan adalah salah satu bentuk dari konflik yang terjadi baik secara vertikal, horizontal maupun kombinasi antara keduanya. ¹⁵

Secara umum, identitas selain difungsikan secara sosial kultural, yaitu sebagai penguat kekerabatan, persaudaraan, dan kerjasama, dan pada sisi lain, identitas juga difungsikan secara politis, yaitu sebagai cara untuk melawan penjajah maupun mengartikulasikan kepentingannya atas ketidakadilan yang di lakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Pada fungsi terakhir tersebut, politik identitas dapat termaknai dengan baik. Namun, dalam perkembangan kontemporer, kemunculan politik identitas ini tidak lagi hanya identik dengan kepentingan kelompok minoritas, tapi juga kepentingan kelompok elite. Pada titik ini, identitas dikonstruksi dan di gunakan tidak hanya sebagai sarana perjuangan

¹⁵Ibid, hal 81

artikulasi politik tetapi juga sebagai instrumen politik bagi kelompok kepentingan tertentu.¹⁶

Dari pernyataan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasannya politik identitas dimaknai sebagai politik perbedaan. Dimana perbedaan kelompok antar golongan dalam suatu daerah namun politik identitas bisa juga membuat penguat kekerabatan dan persaudaraan sehingga kelompok-kelompok identitas mempunyai sifat saling menghargai dan bertoleransi antar perbedaan satu sama lain.

Semakin banyak perbedaan dalam suatu masyarakat maka semakin tinggi potensi konflik yang ada dalam suatu daerah, bagaimana untuk meredam dan mengendalikan suatu konflik tersebut itulah yang disebut politik identitas yang mana politik identitas sangat bergantung pada pemimpin dalam suatu masyarakat, jadi kemampuan seorang pemimpin dalam mengelola perbedaan masyarakat itu sangat menentukan apa yang terjadi dengan masyarakat tersebut.

G. Metodologi Penelitian

a. Metode Penelitian atau Pendekatan

Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologi adalah metode penelitian yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif. Dimana metode penelitian ini terdiri atas lokasi penelitian, tipe dan dasar penelitian, sumber data, penentuan informan, teknik pengumpulan data dan metode analisis data. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan fakta sekaligus menjawab apa yang menjadi masalah dalam judul yang peneliti angkat khususnya yaitu tentang bagaimana kehidupan umat

¹⁶ Ibid, hal 96

beragama dan etnis di Desa Nusa Jaya Kecamatan Belitang 3 Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur (OKU TIMUR) Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer dikumpulkan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian yakni di Desa Nusa Jaya untuk menemui informan dan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Peneliti melakukan tanya jawab secara lisan kepada informan Kepala Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data penunjang untuk memperkuat data primer. Dalam data sekunder penelitian yang diperoleh peneliti dari buku-buku, jurnal, internet, berita dan sumber lain yang ada relevansianya dengan penelitian ini.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Desa Nusa Jaya Kecamatan Belitang 3 Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur (OKU TIMUR) Provinsi Sumatera Selatan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat

interaktif dan non interaktif.¹⁷ Teknik pengumpulan yang di peroleh melalui penelitian ini yaitu melakukan wawancara/interview, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, yang dimana peneliti sebagian besar hanya mengajukan pertanyaan dan subyek penelitian hanya bertugas menjawab pertanyaan saja. Terlihat adanya garis yang tegas antara peneliti dengan subyek penelitian. Selam proses wawancara harus sesuai dengan pedoman wawancara (*guideline interview*) yang telah dipersiapkan.

Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada kepala Desa, tokoh adat, pemuka agama dan tokoh masyarakat di tempat objek penelitian, penelitian ini di lakukan di Desa Nusa Jaya Kec Belitang 3 Kab Ogan Komering Ulu Timur (OKU TIMUR).

e. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁸ Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

Menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan

¹⁷Sutopo, Metodologi Penelitian Kualitatif, Surakarta: Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 50.

¹⁸Prof. Dr. Sugiyono, metode penelitian, Bandung: Alfabeta, cv, 2017, hlm 244.

kesimpulan/verifikasi. Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil data yang pokok dan penting membuat kategorisasi, berdasarkan huruf besar, huruf kecil, dan angka.¹⁹

1. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa di lakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles & Huberman (1984) menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁰

2. Menarik Kesimpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles & Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang

¹⁹ Ibid, hlm 247.

²⁰ Ibid, hlm, 249

valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulakn data, maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.²¹

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengeni lokasi dari objek yang diteliti. Lokasi ini di Desa Nusa Jaya Kecamatan Belintang 3 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan berfokus pada pengelolaan masyarakat multi identitas nya.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL ANALISIS PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan hasil temuan serta menganalisisnya menggunakan teori Politik Identitas.

²¹ Ibid, hlm, 252

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

